

Anies Baswedan Janji Bebaskan PBB Sekolah dan RS Swasta

JAKARTA (IM) - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, janji bakal membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk sekolah, kampus, dan rumah sakit swasta, jika dirinya terpilih sebagai presiden RI selanjutnya.

Anies mengatakan, pihak swasta banyak membantu negara dalam urusan kesejahteraan sosial. Misalnya, mendirikan sekolah, yayasan, fasilitas kesehatan, hingga rumah jompo, termasuk menanggung segala bebannya. Atas bantuan tersebut, Anies ingin memberikan insentif dengan cara pembebasan PBB. Ia tidak ingin negara memonopoli peran.

"Banyak sekali di masyarakat yang ikut menjalankan yang sesungguhnya bukan tanggung jawab mereka. Negara bertanggung jawab atas itu semua, tapi masyarakat melakukannya," kata Anies dalam satu acara pada Rabu (22/11) malam.

"Kami ingin kita kolaborasi, negara membantu mereka. Jadi ke depan cara kita, membantu semua yang melakukan kegiatan terkait kesejahteraan, kita akan bebaskan pajak bumi dan bangunan untuk seluruh sekolah swasta, kampus-kampus swasta sehingga mereka tidak punya beban. Karena

beban terbesar di situ," katanya.

Menurut Anies, membebaskan PBB merupakan cara negara berterima kasih kepada pihak swasta. Negara harus memberikan kemudahan untuk pihak swasta yang berfokus pada isu kesejahteraan sosial di masyarakat. Negara juga mestinya memfasilitasi kebutuhan pihak swasta. Misalnya bila pihak swasta tidak punya lahan, negara bisa memberikan.

"Negara tidak boleh pelit dengan rakyatnya, negara justru harus memfasilitasi. Bila tanah kita bisa dipakai untuk pendidikan, untuk kegiatan kesehatan, maka negara tidak boleh bertransaksi dengan justru memberikan biaya yang mahal untuk kegiatan sosial menggunakan tanah negara," kata Anies.

Anies yakin kebijakan pembebasan PBB ini akan berdampak baik ke masyarakat.

Tanpa pungutan pajak, misalnya, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sekolah swasta bisa lebih murah. Begitu pula dengan tagihan rumah sakit swasta yang dikelola oleh yayasan, nilainya bakal jadi lebih terjangkau. ● **mei**

Capres Ganjar Pranowo Janjikan Bakal Sikat Segala Bentuk KKN

JAKARTA (IM) - Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, di acara dialog terbuka yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, berjanji akan sikat segala bentuk Korupsi, Kolu dan Nepotisme (KKN).

"Insyaallah kalau jaminan itu ada, angka harapan hidup akan tinggi. Maka bapak ibu tugas kita adalah fastabiqul khairat, untuk kita bisa berlomba-lomba, maka istilah kami gaspol," ujar Ganjar, Kamis (23/11).

Ganjar lalu membeberkan tentang pihaknya bakal mendo-rong Gaspol, lalu adanya anggaran berlipat ganda sehingga tak boleh ada korupsi. Dia juga menyebutkan jika pajak bakal dipermudah.

"Kita S-nya sikat KKN, karena ini yang menjadi penyakit di negeri ini. Dan Polnya kita memoles birokrasi yang melayani, yang analitis, bukan sekadar administratif," kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menerangkan bahwa semua itu butuh regulasi lantaran jika regulasi sudah baik sistem

kelembagaan. Kalau sistem kelembagaan sudah baik, maka dibutuhkan pula aktor baik.

"Mudah-mudahan aktor-aktor baik itu ada di sini. Biarlah nanti bisa bergabung dengan kami," tandasnya.

Ngaku Nervous
Ganjar sempat mengaku *nervous* menghadiri kegiatan tersebut sehingga harus dikawal oleh partai pendukung dan relawannya.

"Karena saya agak *nervous* datang ke sini, maka saya diantar oleh partai pengusung saya, ada dari PDIP, dari Partai Perindo," ujar Ganjar.

Ganjar menyebutkan, biar lebih mantap dia juga diantar pula oleh para relawan pendukungnya. Pasalnya, dialog yang diikutinya itu membuat dia sampai berdebar-debar.

"Karena ini serius, saya agak berdebar-debar menyiapkannya," tutur Ganjar disambut gemuruh para penonton di lokasi. ● **mei**

Gibran Rakabuming Dianggap sebagai Representasi Anak Muda Indonesia

JAKARTA (IM) - Sekjen Gibran Center, Fathul Nuroho, menyebut Gibran Rakabuming Raka menjadi simbol dan representasi anak-anak muda Indonesia.

Kepengurusan Gibran Center resmi dikukuhkan, Rabu (22/11) di Posko Gibran Center, Jalan Gedung Hijau Raya Nomor 77, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Gibran Center merupakan transformasi dari Tim Relawan Nasional 01 yang dibentuk tahun 2019, dan turut memenangkan Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Fathul mengatakan pengukuhan itu bertujuan mengajak masyarakat, khususnya anak muda untuk bergabung dalam wadah Gibran Center. Dia berharap Gibran Center menjadi gerakan kerelawanan yang akan menjadi wadah bagi anak muda Indonesia dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Bukan hanya memenangkan di Pilpres ini, Gibran Center juga menjadi *center of excellence* yang akan memberikan berbagai masukan, program, dan kebijakan kepada pasangan Prabowo-Gibran," ujar Fathul.

Kehadiran Gibran Center

disebutnya untuk menunjukkan majunya Gibran sebagai cawapres berasal dari dorongan anak muda.

"Mas Gibran maju sebagai simbol dan representasi anak muda Indonesia. Bahwa yang namanya anak muda mampu mengelola negara sebesar Indonesia dan akan membawanya terbang lebih tinggi lagi," kata pria yang juga merupakan Presiden Alumni LKYSPP, National University of Singapore Chapter Indonesia.

Kegiatan Gibran Center bakal disiapkan menasar anak-anak muda. Diharapkan ara generasi muda dapat mengembangkan potensi, bakat, dan minat, sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Gibran Center merupakan program jangka panjang. Selain untuk memenangkan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka dalam kontes Pilpres 2024, Gibran Center akan terus berkiprah guna memberikan kontribusi positifnya kepada bangsa dan negara juga masyarakat luas," katanya. ● **mei**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAKER MENKOP UKM DENGAN KOMISI VI DPR

Menkop dan UKM Teten Masduki mende-ngarkan tanggapan dari anggota Komisi VI DPR saat raker di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (23/11). Raker membahas penanganan kredit macet pelaku UMKM diantaranya korban gempa 2006 dan korban COVID-19.

Presiden Terbitkan Aturan Cuti Menteri hingga Wali Kota untuk Kampanye

Penjabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, diwajibkan cuti saat kampanye Pemilu 2024.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang tata cara pengunduran diri dan cuti bagi menteri, gubernur, dan, wali kota/bupati saat kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Dalam beleid itu, Kepala Negara mewajibkan cuti bagi menteri maupun penjabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota saat berkampanye.

Pada aturan itu juga disebut bahwa mereka dapat melakukan kampanye apabila sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, berstatus sebagai anggota partai politik, atau anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaf-

tarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota yang melaksanakan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menjalankan cuti," tulis salinan beleid, dikutip pada Kamis (23/11).

Satu pasal dalam beleid itu, yaitu Pasal 34A bagian ketiga di antara Pasal 34 dan Pasal 35. Pasal tersebut mengatur tentang waktu-waktu untuk cuti. Dalam Pasal 34A ayat (1), misalnya, penjabat negara seperti menteri hingga wakil wali kota dapat cuti pada waktu pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Kemudian, cuti juga dapat

diajukan pada pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan selama masa kampanye Pemilihan Umum atau cuti sesuai dengan kebutuhan.

Pada ayat (2), permohonan izin cuti itu diajukan dengan beberapa ketentuan. Jika cuti dilakukan oleh menteri dan pejabat setingkat menteri, maka pengajuannya diajukan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara.

Jika cuti dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur, maka cuti diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada presiden.

Kemudian, jika cuti dilakukan oleh bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota maka diajukan kepada gubernur dengan

tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

"Permohonan izin Cuti memuat jadwal dan jangka waktu, tempat dan/atau lokasi, dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," tulis ayat (3).

Sebagai informasi, KPU RI telah menetapkan tiga

pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dua di antaranya menjabat sebagai menteri, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Sedangkan satu lainnya adalah seorang wali kota, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. ● **han**

Calon Hakim "Ad Hoc" Ternyata Caleg PSI, Diusir DPR saat Jalani *Fit and Proper Test*

JAKARTA (IM) - Calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) Manotar Tampubolon diusir anggota DPR saat sedang mengikuti *fit and proper test* atau uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11).

Manotar diusir Komisi III DPR lantaran masih berstatus sebagai anggota partai politik (parpol) sekaligus menjadi caleg. Mulanya, Manotar diberi kesempatan untuk memaparkan presentasinya di hadapan para anggota Komisi III DPR.

"Judulnya proses penyelidikan, penuntutan, dan peradilan HAM berat menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," ujar Manotar.

Setelah Manotar menyelesaikan pemaparannya, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI-P Nurdin mendapati Manotar ternyata seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Dari data yang kami dapat, bapak kan caleg, Pak. Sudah caleg tetap kan. Ini gimana kalau caleg tetap mau ikut pemilu atau nanti ikut ini dulu. Kalau hakim mungkin tidak lulus, ikut caleg, gitu, Pak. Jangan sampai jadi diang-gap job seeker gitu," kata Nurdin.

Manotar pun menjawab pertanyaan Nurdin itu. Manotar mengaku sudah tidak beraktivitas di PSI lagi.

"Bisa saja jawab, setelah saya mengikuti beberapa seleksi dan terakhir wawancara di KY, saya sudah tidak punya aktivitas lagi untuk di partai, begitu, Pak," kata Manotar.

Namun, anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani merasa jawaban Manotar masih kurang tegas. Sebab, Manotar tidak menjelaskan apakah dirinya sudah mundur dari PSI dan dicoret dari daftar caleg atau belum.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Nasir Djamil pun mendesak Manotar menunjukkan bukti bahwa dia sudah bukan caleg dan kader PSI lagi.

"Jadi kalau Bapak belum mundur, nama Bapak pasti akan ada gitu loh di DCT. Proses ini kan lama, Pak, di KY berbulan-bulan. Ini harus dijawab tegas karena terkait dengan keputusan Komisi III nanti," jelas Arsul.

"Saya pikir ketua, juga kalau benar mengundurkan diri harus ditampakkan suratnya. Di sini atau di mana," timpal Nasir.

"Jawab dulu, Pak, sudah mundur apa belum?" tanya Sahroni menengahi.

Lalu, Manotar mengakui dirinya belum mundur secara resmi dari PSI.

Namun, lagi-lagi Manotar bersikeras bahwa dirinya sudah tidak beraktivitas apa-apa di PSI.

"Saya belum mengundurkan diri secara resmi, tapi saya sudah tidak mengikuti proses apa-apa di partai," kata Manotar.

Sahroni lantas menjelaskan aturan mengenai tata cara seleksi calon hakim ad hoc HAM di MA, di mana calon hakim tidak boleh menjadi bagian dari anggota partai politik.

Dengan demikian, jika Manotar belum mundur dari PSI maka Manotar tidak bisa melanjutkan proses *fit and proper test*.

Semua anggota Komisi III DPR pun setuju Manotar tidak boleh melanjutkan proses sebagai calon hakim ad hoc HAM.

"Jadi, kalau Bapak belum mundur, walaupun prosesnya Bapak tidak ikut, jadi dengan memohon maaf kalau Bapak enggak mundur maka aturan ini berlaku sebagai pengurus parpol. Nah Bapak harus tunjukkan yang disampaikan Pak Nasir Djamil tadi surat pengunduran diri dari anggota paprol ataupun sebagai caleg," kata Sahroni.

"Makanya tadi tanya, mau terusin atau setop? Oke dengan keputusan bersama teman-teman, kita setop tindak lanjut syarat karena Bapak tidak memenuhi syarat. Dari-pada Bapak menunggu lama-lama duduk di situ lebih baik dipersilakan untuk meninggalkan ruang Komisi III DPR RI," katanya. ● **han**

Empat Aset Firli Bahuri di Lampung

LAMPUNG (IM) - Sebagai orang nomor satu di KPK, Firli Bahuri setiap tahun menyempatkan laporan harta kekayaan atau LHKPN. Tercatat, dalam LHKPN yang disampaikan pada 20 Februari 2023 untuk periodik 2022, Firli memiliki harta kekayaan dengan total mencapai Rp22,8 miliar lebih.

Dari beberapa harta kekayaan yang dimiliki Firli itu, 4 di antaranya berada di Bandar Lampung yang terdiri dari aset tanah.

Berdasarkan laman LHKPN KPK yang dilihat MNC Portal pada Kamis (23/11), setidaknya ada empat aset tanah milik Firli berada di Bandar Lampung dengan total nilai aset men-

capai Rp 1.650.000.000.

Aset tanah yang berada di Bandarlampung itu dengan rincian sebagai berikut:

1.Tanah seluas 300 m2 di kab / kota Kota Bandar Lampung, hasil sendiri Rp 412.500.000.

2.Tanah seluas 300 m2 di kab / kota Kota Bandar Lampung, hasil sendiri Rp 412.500.000.

3.Tanah seluas 300 m2 di kab / kota Kota Bandar Lampung, hasil sendiri Rp 412.500.000.

4.Tanah seluas 300 m2 di kab / kota Kota Bandar Lampung, hasil sendiri Rp 412.500.000.

Firli Bahuri merupakan seorang polisi sebelum menjabat sebagai Ketua KPK. Dia juga pernah ber-

tugas di Lampung.

Berdasarkan riwayat jabatan karirnya, Firli pernah menjabat sebagai Kapolres Lampung Timur pada tahun 2001 lalu, kemudian pernah menjadi Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung pada tahun yang sama.

Selanjutnya pada tahun 2002, Firli pernah menjabat sebagai Wakapolres Lampung Tengah dan pada tahun 2003 pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Satuan II Direktorat Reserse Kriminal Polda Lampung.

Karir jabatannya di kepolisian kemudian meroket hingga akhirnya dipercaya menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2019 lalu. ● **han**

FOTO: ANT



APEL SIAGA TAHAPAN KAMPANYE PEMILU 2024

Anggota Bawaslu mengucapkan ikrar pengawasan saat apel siaga tahapan kampanye Pemilu 2024 di Marga Utama kompleks Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jateng, Kamis (23/11). Apel siaga yang diikuti 850 anggota Bawaslu se-Jateng tersebut sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam mengawasi, mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu 2024.